

**PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA
GURU DI SMK NEGERI 1 TANJUNG PALAS**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1) Administrasi Negara Pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

ABDUL KARIM

NPM : 201951043

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Inayah, Taufik dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “**Program Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMK Negeri 1 Tanjung Palas**” dalam bentuk dan isinya yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan proposal ini mengalami banyak kendala, namun berkat Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat dihadapi.

Dalam pembuatan proposal ini banyak sekali para pihak yang membantu dan berkontribusi. Proposal ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki masih sangat kurang. Oleh karena itu penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan proposal ini dan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tanjung Selor, 10 Oktober 2024

Penulis,

Abdul Karim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	IV

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi	5
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Landasan Teori	11
2.4 Kerangka Berpikir	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian	29
3.3 Data dan Sumber Data	30
3.4 Fokus Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Keabsahan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	36
4.2 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	38
4.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	40

4.4 Struktur Organisasi Dinas Provinsi Kalimantan Utara	41
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	41
4.6 Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru	45
4.7 Program Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	47
4.8 Profil SMK Negeri 1 Tanjung Palas	50
4.9 Program Dinas Pendidikan Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri 1 Tanjung Palas	54
4.10 Faktor Penghambat Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	33
Gambar 4.2 Peta Jalan Pengembangan Sekolah	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu dorongan untuk menumbuhkembangkan potensi Sumber Daya Manusia sehingga tercipta generasi yang siap menghadapi permasalahan global dimasa yang akan datang.

Upaya mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan punya daya saing yang tinggi tidak akan terlepas kaitannya dengan program pendidikan nasional, karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai unsur utama penggerak pembangunan nasional. Maju atau tidaknya suatu Negara dapat diukur dari kualitas pendidikannya.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih tegas dalam UUD NKRI Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah Kabupaten dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Dasar Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Pemkab diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu Pemprov juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 Tahun.

Berdasarkan uraian diatas, berkenaan dengan objek penelitian dalam skripsi ini, yaitu bertempat di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, maka peneliti akan berfokus pada program-

program dinas Pendidikan yang berada dibawah kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai dengan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Peran Dinas Pendidikan merupakan aspek dinamis dalam menjalankan tugas, hak, dan kewajiban sesuai dengan kedudukan sebagai bagian atau perangkat dari Pemerintah yang mengurus bidang pendidikan yang aktif dan berpartisipasi dalam memberikan sumbangan yang berguna dengan tujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas.

Aspek kualitas menyangkut mutu dari Sumber Daya manusia tersebut. Kualitas Sumber Daya Manusia ini juga menyangkut dua aspek yaitu, aspek Fisik (kualitas fisik) dan Aspek Non Fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Sedangkan aspek kuantitas menyangkut jumlah Sumber Daya Manusia itu sendiri yang mana kurang penting kontribusinya dalam pembangunan dibanding dengan aspek kualitas, karena kuantitas tanpa kualitas Sumber Daya Manusia yang baik akan menjadi beban pembangunan.

Peranan Pendidikan di dalam kehidupan manusia, lebih-lebih di zaman modern ini pendidikan diakui sebagai kekuatan yang menentukan perubahan, prestasi dan produktivitas seseorang. Seseorang tidak berfungsi apa-apa di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Tanpa didukung sarana yang memadai, proses pendidikan tentunya akan mengurangi efektifitas pembelajaran bahkan hal terburuk yang bisa terjadi tanpa dukungan sarana yang tepat maupun memadai proses pendidikan akan tersendat bahkan bisa saja terhenti secara total.

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih mengetahui bagaimana keberpengaruhan program dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI 1 TANJUNG PALAS”**

Penelitian ini bertempat di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Program Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru di Smk Negeri 1 Tanjung Palas?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan dalam menjalankan program Dinas Pendidikan sebagai upaya peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Untuk menggambarkan apa saja pengaruh program dinas Pendidikan dan faktor penghambatnya terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan peneliti dalam bentuk karya ilmiah berupa proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan baik secara teoritis maupun secara praktis, terutama mengenai program dinas pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini akan memberikan khazanah pengetahuan pengembang ilmu khususnya di bidang program dinas pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru pada umumnya.
- b. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh banyak akademisi di bidang pendidikan :

- 1) Bagi Pengawas, dapat bermanfaat sebagai pedoman dan acuan dalam menerapkan teknis dan prosedur sistematis untuk memantau kinerja pengawas di lembaga pendidikan agar dapat berfungsi dengan baik, efektif dan efisien.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan referensi penelitian bagi yang menimba ilmu di bidang ini.
- 3) Bagi Pembaca, dapat menjadi referensi bahan bacaan dan pengetahuan bagi yang mempelajari bagian program dinas Pendidikan dalam peningkatan kinerja guru khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 IDENTIFIKASI

A. Pengertian Program

Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Menurut Saifudin Anshari, program merupakan daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Wholey, et.al (1994: 41) menyatakan bahwa program dapat didefinisikan sebagai seperangkat sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama. Menurut Suharsimi Arikunto (2012:291) mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedangkan Farida Yusuf Tayibnapis (2013: 9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam melaksanakan sebuah program perlu adanya sasaran, manfaat dan tujuan tertentu untuk dapat dikatakan program tersebut berhasil. Biasanya dalam melaksanakan terdapat pengelolaan program berupa perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program.

Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Teori pendukung penelitian tentang evaluasi sebuah program pembelajaran yang digunakan untuk proses, dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. mengetahui efektifitas/ketercapaian tujuan pembelajaran beserta keterlaksanaan setiap proses belajar mengajar. Dengan memperoleh data tersebut maka dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sudah terjadi. Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat dimanfaatkan untuk membuat program pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

Komponen evaluasi belajar mengajar ini dibagi ke dalam context, input, process, dan product. Selanjutnya aspek-aspek yang terkait dengan KBM diantaranya meliputi:

fasilitas, guru, siswa, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, waktu pelaksanaan dan hasil praktik siswa.

B. Pengertian Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan adalah unit pelaksana pemerintahan di bidang pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang nantinya bertanggung jawab pada Bupati/Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Daerah Provinsi. Jika Dinas Pendidikan berada di lingkup provinsi, maka disebut Dinas Pendidikan Provinsi. Kantornya, biasanya terletak di ibukota masing-masing provinsi. Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah yang diberikan wewenang, tugas, dan bertanggung jawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dan dekosentrasi.

Pelaksanaan pendidikan di suatu daerah tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Untuk urusan pendidikan di tingkat daerah diserahkan sepenuhnya pada Dinas Pendidikan daerah masing-masing. Sementara itu, untuk urusan pendidikan di lingkup provinsi, diserahkan sepenuhnya pada Dinas Pendidikan provinsi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang perlu ditangani secara profesional oleh pemerintah.

Salah satu tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan adalah mengelola perkembangan pendidikan untuk anak-anak dengan mengetahui perkembangan anak-anak yang dilaporkan langsung oleh guru maka dapat mengetahui tumbuh kembang kemampuan siswa yang dimiliki.

Dalam pengelolaan kegiatan sering sekali mengalami kesulitan dalam melaksanakan program kerja karena ketiadaan program kerja. Keberadaan dinas pendidikan sebenarnya sudah eksis pada Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. Tinggal program dari bupati/walikota/gubernur yang harus bijaksana dalam melaksanakan program kependidikan.

Mendapatkan pendidikan yang baik adalah hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, Samad dalam Usman (2014: 20) menyebutkan bahwa “Untuk mewujudkan pendidikan

yang berkualitas agar SDM semakin baik, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakannya”. Hasil amandemen pada alinea ke 4 dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia”. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya dijadikan alat untuk menaikkan derajat sosial masyarakat saja, pendidikan juga dapat menjadikan masyarakat yang cerdas sehingga dapat menciptakan SDM yang berkualitas.

C. Kesiapan SMK dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS.

Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatism dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara. Oleh karena itu, Junaedi & Wulandari (2020) menyatakan bahwa kurikulum yang merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran, keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan.

Tahun pelajaran 2022/2023 pendidikan Indonesia khususnya pendidikan dasar dan menengah melaksanakan kebijakan nasional yang penting yaitu pemberian tiga opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum

2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kurikulum prototipe. Penerapan kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan di Indonesia mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan Kurikulum Darurat lebih maju empat sampai lima bulan belajar daripada yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh (Kemendikbud, 2021).

Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 (Sanjaya & Rustini, 2020). Kurikulum darurat lahir dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yang terjadi dalam kondisi khusus. Satuan Pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu kepada Kurikulum 2013 dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang disederhanakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik dan capaian kompetensi pada kurikulum (Ornstein & Hunkins, 2018), kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan (Rusman, 2017). Selain itu Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, Satuan Pendidikan tetap dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku teks pelajaran yang sudah digunakan pada Kurikulum 2013 dengan cara memilih materi yang sesuai dengan kompetensi yang digunakan pada Kurikulum 2013 yang disederhanakan.

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran (Kemendikbud, 2022). Salah satu karakteristik kurikulum Merdeka adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila. Dalam kurikulum merdeka, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek

pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Belwal et.al (2020) dan Zen et.al (2022) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman (*experiential learning*). Pembelajaran difokuskan pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi; dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan besar peran sekolah dan guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Guru tidak hanya sebagai implementator kurikulum tetapi juga sebagai pengembang, sementara sekolah dalam hal ini kepala sekolah memegang peran penting untuk memutuskan kurikulum yang akan dipilih yaitu tetap kurikulum 2013, kurikulum masa pandemi atau kurikulum merdeka. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilaksanakan agar kesiapan guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka dapat diketahui secara ilmiah. Temuan ini akan menjadi bahan untuk proses perbaikan atau peningkatan kualitas implementasi kurikulum merdeka pada masa yang akan datang.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan pencarian, berikut beberapa penelitian yang peneliti temukan.

Nomor 1	
Nama Peneliti	Yosi Febriwita
Tahun Terbit	2020
Judul	Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Di Kabupaten Simeulue
Metode Penelitian	Penelitian Kualitatif
Hasil	Peningkatan kualitas guru Kabupaten Simeulue diukur dari kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi yang diamanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik (minimal D-IV atau S1), kompetensi, sertifikat pendidik (sertifikasi), sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan

	<p>pendidikan nasional. Dinas Pendidikan telah melakukan program kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di Kabupaten Simeulue. Untuk meningkatkan kualifikasi guru yaitu melalui program yakni kualifikasi pendidik dengan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat). Kemudian untuk mengurangi kekurangan guru Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue membuka lowongan tenaga pendidik atau guru kontrak daerah sebanyak 600 guru yang akan ditempatkan disejumlah sekolah.</p>
Nomor 2	
Nama Peneliti	Muntiaroh
Tahun Terbit	2011
Judul	Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pasca Sertifikasi Profesi Guru
Metode Penelitian	Metode Kualitatif
Hasil	<p>Program Pembinaan Kompetensi Guru meliputi; 1) pembinaan dan pengembangan kompetensi paedagogik yang melalui program <i>Teaching clinic</i>; 2) pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Profesional melalui program <i>Teaching clinic</i>, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lain sebagainya; 3) pembinaan dan pengembangan Kompetensi Kepribadian melalui program <i>Teaching Clinic</i> belum ada karena di dalam program ini tidak diadakan model pembinaan secara khusus, workshop yang dilakukan ialah pembinaan ESQ, training yang diselenggarakan satu tahun sekali dan pemberian promosi dan penghargaan sesuai kompetensi (prestasi kerja) berupa: uang/barang, pemberian piagam, promosi jabatan; 4) pembinaan dan pengembangan Kompetensi Sosial melalui program <i>Teaching clinic</i> belum ada secara khusus dalam model pembinaannya, praktek pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran, dan lain sebagainya.</p> <p>Program Unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengembangan guru pasca sertifikasi sebagai program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam melakukan pembinaan dan pengembangan guru pasca sertifikasi ialah adanya pelaksanaan program <i>teaching clinic</i> dan setelah adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan baik <i>teaching clinic</i> maupun kegiatan lain yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati selanjutnya diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev).</p> <p>Hambatan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi meliputi permasalahan dari dalam (internal) yaitu rendahnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya, minimnya kemampuan guru di bidang ICT (<i>information, communication dan technology</i>) dan permasalahan dari luar (eksternal) yaitu belum adanya program evaluasi pasca sertifikasi</p>

	(<i>skill audit</i>), peluang pengembangan karier yang belum jelas (<i>CDP/Continuous Professionalism Development</i>).
Nomor 3	
Nama Peneliti	Irmaya Rinda Puspita, H. Muhammad Noor, dan Endang Erawan
Tahun Terbit	2020
Judul	Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kota Samarinda
Metode Penelitian	Penelitian deskriptif kualitatif
Hasil	Peran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sejauh ini sangat berperan pada peningkatan kualitas melalui kualifikasi tidak sekedar kualifikasi akademik namun juga berperan dalam meningkatkan kualitas guru melalui kualifikasi pendidikan profesi demi meningkatkan kualitas guru menjadi seorang guru profesional. Hasil ini bisa dilihat dengan hasil data yang memperlihatkan bahwa guru SMK di kota samarinda hampir sudah terqualifikasi semua sesuai dengan yang seharusnya. Selain itu Dinas Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi guru. Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Samarinda ialah masalah dengan masih adanya guru yang belum terqualifikasi sesuai dengan seharusnya karena usia yang terlalu tua. Lalu masalah biaya yang terbatas dalam melaksanakan sertifikasi padahal minat guru sangat besar dalam mengikuti program sertifikasi tersebut. Serta kendala dinas pendidikan dalam melakukan program kompetensi yang tidak memiliki dampak apa-apa bagi guru ketika guru itu kembali ke sekolah.

2.3 LANDASAN TEORI

A. Teori Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan, terlebih dahulu perlu di ketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering di pergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagoik. Pedagogi berarti “pendidikan” sedangkan pedagoik artinya “ilmu pendidikan”. Kata pedagogos yang pada awalnya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian pedagogi (dari pedagogos) berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri

sendiri dan bertanggung jawab. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal yaitu: segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman.

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Jadi, pendidikan bisa disimpulkan sebagai proses yang dilakukan untuk mendewasakan manusia agar bisa bertanggung jawab dalam segala kewajibannya baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Pemerintah berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk modal dasar pembangunan Indonesia dimasa depan.

Ada berbagai konsep hasil studi berbagai disiplin ilmu yang dipandang memiliki arti pendidikan. Munculnya berbagai konsep tersebut disebabkan setiap disiplin ilmu memiliki objek studi yang spesifik berkenaan dengan manusia. Berdasarkan pendekatan

sosiologi, pendidikan dipandang identik dengan sosialisasi yaitu suatu proses membantu generasi muda agar mampu menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Emile Durkheim bahwa: “Pendidikan adalah pengaruh yang dilakukan oleh generasi orang dewasa kepada mereka yang belum siap untuk melakukan kehidupan sosial. Sasarannya adalah membangun dan mengembangkan sejumlah kondisi fisik, intelek, dan moral pada diri anak sesuai dengan tuntutan masyarakat politis secara keseluruhan dan oleh lingkungan khusus tempat ia akan hidup dan berada.

Pendekatan pendidikan dimulai dengan mengetahui ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau tehnik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. ruang lingkup pendidikan Islam tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan bagi perumusan desain pendidikan dengan berbagai aspeknya: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut dibangun dari hasil kajian yang ilmiah serta dari berbagai disiplin ilmu yang relevan: sejarah, filsafat, psikologi, sosiologi, budaya, politik, hukum, etika, manajemen, teknologi canggih, dan sebagainya.

Kedua, teori dan konsep yang diperlukan untuk kepentingan praktik pendidikan, yaitu memengaruhi peserta didik agar mengalami perubahan, peningkatan, dan kemajuan, baik dari segi wawasan, keterampilan, mental spiritual, sikap, pola pikir, dan kepribadiannya. Berbagai komponen keterampilan terapan yang diperlukan dalam praktik pendidikan, berupa praktik pedagogis, didaktik, dan metodik, didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep. Pihak - pihak yang terlibat dalam pendidikan yang menjadi ruang lingkup.

1. Perbuatan Pendidik

Yang dimaksud dengan perbuatan pendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi/ mengasuh peserta didik. Atau dengan istilah lain yaitu sikap atau tindakan yang menuntun, membimbing, memberi pertolongan dari seseorang pendidik kepada peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam. Dalam perbuatan mendidik sering disebut dengan istilah tahzib.

2. Pelaku Pendidikan

a. Pendidik

Untuk mengaktualisasikan tujuan pendidikan dibutuhkan seorang pendidik yang dapat bertanggung jawab mengantarkan manusia kearah tujuan tersebut. Keberadaan pendidik dalam dunia pendidikan sangat krusial, sebab kewajibannya tidak hanya mentransformasikan pengetahuan (knowledge), tetapi juga dituntut menginternalisasikan nilai-nilai (vulluelqimah) pada peserta didik. Bentuk nilai yang diinternalisasikan paling tidak meliputi: nilai etika (akhlak), estetika, sosial, ekonomis, politik, pengetahuan, pragmatis, dan nilai ilahiyah. Pendidik adalah setiap orang dewasa yang karena harus bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. pendidik merupakan sifat yang lekat pada setiap orang karena tanggung jawabnya atas pendidikan.

Menurut Abd al-Rahman al-Nahlawi dalam Jalaluddin.¹³, mengatakan syarat seorang pendidik meliputi sifat dan perilaku seperti : harus memiliki sifat Rabbani, menyempurnakan sifat Rabbani dengan keikhlasan, memiliki rasa sabar, memiliki kejujuran dengan menerangkan apa yang diajarkan dalam kehidupan pribadi, meningkatkan wawasan dan kajian, menguasai variasi serta metode mengajar, mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya (proposisi) sehingga ia akan mampu mengendalikan diri dan muridnya, memahami dan menguasai psikologi anak dan memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuan intelektual dan kesiapan psikologisnya, mampu mengetahui fenomena kehidupan sehinggamemahami berbagai kecenderungan dunia beserta dampak yang akan ditimbulkan bagi peserta didik, dan dituntut untuk memiliki sifat adil (objektif) terhadap peserta didik.

b. Peserta Didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Syamsul Nizar, dalam H. Ramayulis mendeskripsikan enam kriteria peserta didik:

- 1) Peserta didik bukanlah miniature orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri.

- 2) Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan.
- 3) Peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada.
- 4) Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan nafsu.
- 5) Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis.

3. Komponen-Komponen Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha untuk mentransfer dan mentransformasikan pengetahuan serta menginternalisasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspek dan jenisnya kepada generasi penerus. Peran pendidikan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita Islam untuk melestarikan, mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi penerusnya, sehingga nilai cultural-religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan sebab, tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dengan tegas dan jelas, menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofi.

a. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.

Dengan memahami kurikulum, para pendidik dapat memilih dan menentukan tujuan pendidikan. Metode, teknik, media pengajaran dan alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Untuk itu dalam melakukan kajian terhadap keberhasilan sistem pendidikan ditentukan oleh tujuan yang realistis, dapat diterima oleh semua pihak, sarana organisasi yang baik, intensitas pekerjaan yang realistis tinggi dan kurikulum yang tepat guna. Oleh karena itu, sudah

sewajarnya para pendidik dan tenaga kependidikan bidang pendidikan Islam memahami kurikulum serta berusaha mengembangkannya.

b. Metode Pendidikan

Metode dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkahlangkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode itu harus diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat dicerna dengan baik. Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh pendidik dalam membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran.

c. Media Pendidikan

Media adalah alat untuk membantu proses belajar, alat untuk mempermudah pemahaman masalah yang sedang dibahas, alat untuk mempermudah mengungkapkan hal-hal yang rumit. Jadi sebagai alat, media bisa digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi tidak untuk semua tujuan. Karena setiap media memiliki ciri (karakteristik), memiliki kekhasannya masing-masing, sehingga hanya tetap digunakan untuk tujuan-tujuan yang khas dan sesuai pula.

Media digunakan oleh para fasilitator bukan semata-mata karena efektif membantu proses pemahaman, tetapi karena penggunaan media itu sendiri merupakan suatu keharusan jika ingin taat-asas pada filosofi pendidikan kritis yang menekankan mutlaknya partisipasi belajar dan memproduksi pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri. Sarana dan proses itulah yang dinamakan media oleh para fasilitator. Ini yang membedakan seorang fasilitator dengan seorang manajer atau guru atau dosen. Walaupun manajer, guru, dan dosen tersebut menggunakan media yang sama, biasanya hanya sebagai peraga atau “penggambaran” (illustration), sebagai pemanis dan pemikat omongan atau ceramah dan kuliahnya agar lebih menarik dan tidak membosankan. Sedangkan bagi fasilitator, media bukan hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi sekaligus sebagai “sandi” (code) untuk mengajak partisipan berpikir tentang sesuatu,

mendiskusikannya bersama, berdialog untuk menemukan suatu kesimpulan dan jawaban mereka sendiri.

d. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang disengaja (sadar) oleh peserta didik dengan arahan, bimbingan atau bantuan dari pendidik untuk memperoleh suatu perubahan.

Perubahan yang diharapkan untuk meliputi aspek kognitif (pengetahuan), efektif (sikap dan tingkah laku) dan psikomotorik (gerakan ragawi/ keterampilan). Perubahan yang diharapkan itu dinamakan dengan kompetensi (kemampuan melakukan sesuatu), dirumuskan sebelumnya dalam disain pembelajaran. Rumusan tersebut biasanya dinamakan dengan tujuan pembelajaran (dulu tujuan intruksional, sekarang kompetensi). Mulai dari kompetensi dasar, kompetensi mata pelajaran, kompetensi lintas disiplin, dan kompetensi lulusan yang dalam GBPP kemudian dijabarkan menjadi beberapa indikator.

Pendidikan sebagai suatu praktik dalam kehidupan, seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan lain. Pendidikan dapat dilihat dalam dua sisi yaitu: pendidikan sebagai praktik dan pendidikan sebagai teori. Diantara keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Praktik pendidikan seharusnya berlandaskan pada teori pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Tujuan praktik pendidikan adalah membantu pihak lain mengalami perubahan tingkah laku fundamental yang

diharapkan. Proses kegiatan merupakan seperangkat kegiatan sosial/bersama, usaha menciptakan peristiwa pendidikan dan mengarahkannya, serta merupakan usaha secara sadar atau tidak sadar melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan. Dorongan atau motivasi untuk melaksanakan praktik pendidikan muncul karena dirasakan adanya kewajiban untuk menolong orang lain.

Pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan (empiris) maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Dalam pendidikan tidak dikenal suatu resep yang pasti (mutlak), karena yang utama dalam pendidikan adalah kreativitas dan kepribadian pendidik. Pendidikan memerlukan teori pendidikan, karena teori pendidikan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Teori pendidikan dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai.
- 2) Teori pendidikan berfungsi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan. Dengan begitu kita dapat mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.
- 3) Teori pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai dimana kita telah berhasil dalam melaksanakan tugas dalam pendidikan.

Teori diartikan sebagai lawan dari hukum-hukum dan observasi, suatu deduksi dari aksioma-aksioma dan teorema-teorema suatu sistem yang pasti (tidak perlu diuji), secara relatif kurang problematis dan lebih banyak diterima atau diyakini.

B. Teori Kinerja

Kinerja merupakan terjemahan dari kata “*performance*” (*job performance*). Secara etimologis *Performance* berasal dari kata “*to perform*” yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan kepadanya.

Menurut Pariata Westra, *Performance* diartikan sebagai hasil pekerjaan atau pelaksanaan tugas pekerjaan. Menurut August W. Smith, *Performance is output derives*

from proses, human or therwise, yaitu kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia.

Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melakukan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler dan Porter (1967), yang mengemukakan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan tugas. Prawirosentono (1999) dalam Sutrisno (2010, h. 170), mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Kinerja (performance) merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan. Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat dipandang sebagai ‘thing done’. Hasibuan (2002) juga mengartikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Simamora, 1995, h. 327).

Dalam Sutrisno (2010, h. 175) menyatakan bahwa perilaku seseorang akan terbawa dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan dalam organisasi, baik organisasi bisnis maupun public. Bila suatu organisasi mempunyai SDM yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi, moral yang tinggi, hokum yang andal, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan mempunyai kinerja yang baik.

C. Teori Guru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”²³ Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karier; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 8 menyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah minimal S1 atau D-IV dan memiliki empat standar kompetensi guru. Keempat standar kompetensi guru tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang profesional dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional guru mempunyai fungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan guru sebagai tenaga yang profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

D. Tujuan Pendidikan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1991: 232) mendefinisikan pendidikan adalah “sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, dan pembuatan mendidik”. Sebagai Bapak Pelopor Pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan: “sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya” (Abdurrachman Surjomihardjo, 1986).

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam dunia pendidikan dikenal pula adanya otonomi pendidikan.

Sementara itu, Ensiklopedi Wikipedia menyebutkan bahwa pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 2 tahun 1989, pendidikan adalah “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan disebutkan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”.

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berakhlak sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu biasanya akan memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan di masa mendatang. Jadi, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pendidikan nasional Indonesia dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan nasional adalah pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. Sukirno menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan.

Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Peningkatan dalam pendidikan memberi beberapa manfaat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan sekaligus dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004).

E. Sistem Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Munib, 2011).

Selanjutnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan yang baik tentu akan berpengaruh lebih bagi peningkatan sumber daya manusia di wilayahnya, apabila pelaksanaan baik dari tahap dasar hingga ke jenjang mahasiswa, tentu peningkatan SDM yang ada di wilayah tersebut bisa berpengaruh baik bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan. Permasalahan yang biasa muncul di suatu wilayah disebabkan karena adanya penyalahgunaan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan. Tentu hal ini harus bisa diselesaikan agar pemerataan pendidikan bisa terlaksana. Dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN.”

Peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan di suatu daerah, hal ini diatur di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dikuatkan oleh undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai pemangku kebijakan di suatu daerah, pemerintah sudah sepatutnya mampu mencetak lulusan atau generasi penerus bangsa yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Di dalam hal ini apabila pendidikan di suatu daerah tidak diperhatikan, maka akan terjadi penurunan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah tersebut. Adanya ikut campur urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat berpengaruh baik bagi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi;

1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional data penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya.
2. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.

Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah merupakan lembaga negara yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan program pendidikan di daerahnya masing-masing. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan kebijakan dalam mengatur kegiatan pelaksanaan pendidikan di daerahnya.

F. Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Menurut Rusman, antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya.

Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.

Menurut Achmad (1993), Mutu Pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Engkoswara (1986) melihat mutu atau keberhasilan pendidikan dari tiga sisi; yaitu: prestasi, suasana, dan ekonomi. Dalam hubungan dengan mutu sekolah, Selamat (1998) berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah, dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah.

Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Berikut ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

- Rendahnya sarana fisik
- Rendahnya kualitas guru
- Rendahnya kesejahteraan guru
- Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan
- Mahalnya biaya Pendidikan.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Dalam konteks sekolah apabila seseorang mengatakan sekolah itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa sekolah tersebut sesuai dengan standar, lulusannya baik,

gurunya baik, gedungnya baik, dan sebagainya. Untuk menandai sesuatu itu bermutu atau tidak seseorang memberikan simbol dengan sebutan-sebutan tertentu, misalnya sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah percontohan, sekolah model dan lain sebagainya.

G. Kinerja Guru

Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada yang meliputi menyusun program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan analisis evaluasi.

Kinerja guru merupakan aktivitas atau perilaku yang menonjol oleh para guru dalam bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun kinerja guru pada tugas pokok guru adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat program pengajaran/rencana kegiatan belajar mengajar semester /tahun.
- 2) Membuat program perencanaan pembelajaran
- 3) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- 4) Mengadakan kegiatan penilaian belajar semester/tahun
- 5) Mengisi daftar hadir siswa
- 6) Melaksanakan analisis hasil belajar
- 7) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
- 8) Melaksanakan kegiatan membimbing
- 9) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing- masing siswa

Melaksanakan tugas tertentu di sekolah

Kinerja guru dilakukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik di sekolah. Kinerja guru merupakan elemen penting dalam Pendidikan. Selain itu juga merupakan penentu tinggi rendahnya kualitas (mutu) Pendidikan. Oleh karena itu setiap guru harus memahami tujuan Pendidikan nasional, agar setiap dan tindakan dalam mengajar peserta didik diarahkan pada tujuan Pendidikan nasional yang telah dirumuskan.

Satu peranan guru sebagai tenaga pendidik yang merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut, Undang-undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan

jabatan professional yang memiliki peranan sentral dan strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Perihal guru dengan kinerjanya adalah menyangkut seluruh aktivitas yang ditunjukkan oleh guru dalam tanggung jawabnya sebagai orang yang mengemban suatu amanat dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan memandu peserta didiknya dalam rangka menggiring perkembangan mereka ke arah kedewasaan mental-spiritual maupun fisik- biologis yang baik. Dari sudut siswa menyangkut suatu metode dimana siswa diminta menampilkan atau mendemonstrasikan apa yang diajarkan oleh guru, keterampilan, atau gerakan yang diajarkan di bawah suatu kondisi pengawasan melalui proses pembelajaran, sebaiknya dari sudut guru adalah menyangkut bagaimana instruksi guru dalam memberikan arahan berkaitan dengan aspek-aspek tersebut. (Mukhtar dan Priambodo, 2005:1).

Kinerja guru merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah. Kinerja adalah prestasi, hasil kerja atau unjuk kerja. Kinerja guru yang dimaksud adalah hasil kerja guru yang terefleksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses kegiatan belajar mengajar yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin profesional guru dalam proses pembelajaran. Hasil kerja yang ditunjukkan pun haruslah tinggi.

Adapun faktor-faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi kinerja guru yaitu kualitas pengetahuan guru, besarnya kompensasi yang diterima, tingkat kedisiplinan yang dimiliki, motivasi kerja dan lingkungan kerja tempat guru tersebut mengajar. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah kualitas pengetahuan guru. Kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru bukan ada begitu saja, melainkan didapatkan dari proses panjang sebuah pendidikan dan pembelajaran. Keadaan guru di Indonesia menjadi perhatian karena kebanyakan guru belum memiliki profesional yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Seperti faktor kualitas pengetahuan guru di Indonesia masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya adalah guru tidak menguasai materi yang digunakan untuk mengajarkannya kepada peserta didik serta banyaknya guru yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga guru tersebut tidak

dapat menggunakan alat-alat canggih seperti computer serta alat bantu lainnya dalam pembelajaran.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah besarnya kompensasi yang diterima. Pemberian kompensasi ini bisa bentuknya finansial maupun non finansial. Kompensasi finansial terdiri dari bayaran yang diterima oleh guru dalam gaji, upah, bonus dan komisi. Sedangkan kompensasi non finansial terdiri dari fasilitas-fasilitas yang diterima oleh guru. Pemberian kompensasi non finansial terdiri dari fasilitas-fasilitas yang diterima oleh guru. Pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil dan merata sehingga dapat menciptakan suasana hati yang baik pada guru karena kesejahteraan terjamin.

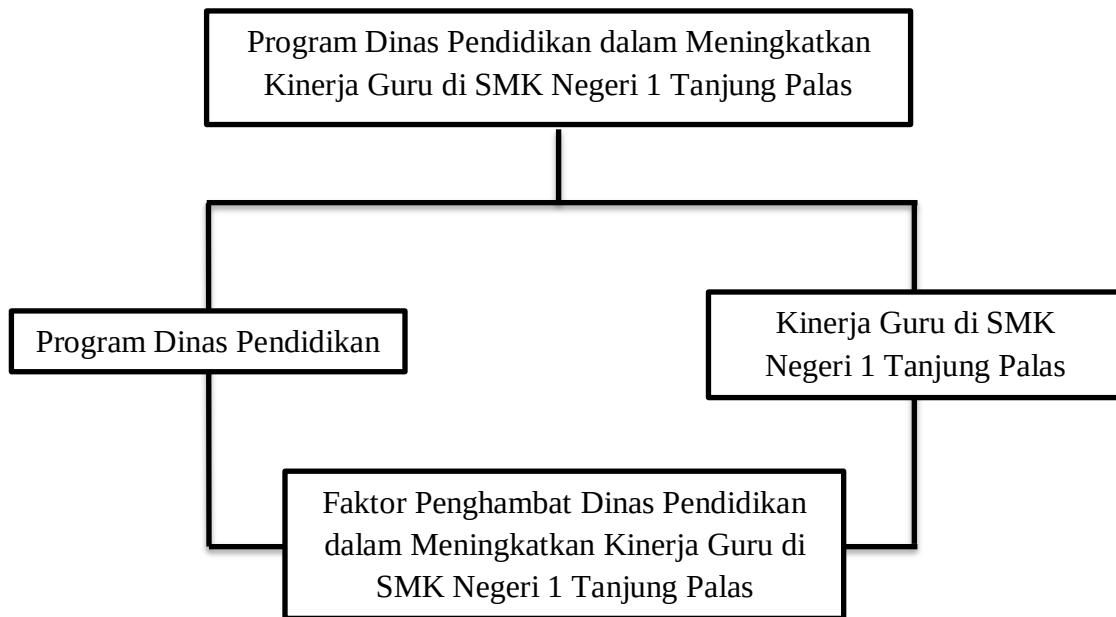
Yang layak terhadap profesi guru sangat tepat, karena guru dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan tidak perlu mencari pekerjaan sampingan sehingga dapat lebih memfokuskan diri terhadap pekerjaannya. Dengan fokusnya perhatian guru terhadap pekerjaan akan mempengaruhi peningkatan produktifitas kerjanya dan kualitas pendidikan pun akan meningkat pula. Setiap orang pasti akan bekerja lebih baik dikemudian hari, apabila hasil kerjanya dihargai dengan mendapatkan gaji atau imbalan jasa yang sesuai dengan pekerjaannya.

2.4. Kerangka Berpikir

Keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor. Semua komponen dan elemen pendukungnya harus terpenuhi. Tidak hanya ditentukan oleh faktor *input* (masukan) dalam hal ini adalah calon peserta didik, namun dalam penyelenggaraan pendidikan melibatkan rangkaian *input*, proses, *output* hingga *outcome*. Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses, dimana proses pendidikan ini mengarahkan individu menjadi sosok yang dewasa, mandiri. Dalam kegiatan mengarahkan ini peserta didik membutuhkan pendidik yang dapat membantunya mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, yakni seorang pendidik/guru.

Untuk itu, dengan adanya program-program dari Dinas Pendidikan diharapkan sekolah-sekolah akan mampu menyediakan para pendidik profesional yang mampu mendidik siswa dan siswi guna mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pendidikan dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti membangun kerangka berpikir untuk penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.1 **Bagan Kerangka Berpikir**



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena ini adalah satu-satunya sekolah menengah kejuruan yang ada di Tanjung Palas. Selain itu, lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena lokasinya dekat dengan domisili peneliti. Sehingga akses data, penggunaan waktu, biaya serta tenaga yang dibutuhkan peneliti lebih mudah dan efisien.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilakukan adalah dalam jangka waktu 3 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024. Termasuk dalam pembuatan judul, persiapan proposal, dan persiapan hasil dari penelitian tersebut.

3.2 Jenis Penelitian

Berkenaan dengan judul proposal ini , yaitu “PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI 1 TANJUNG PALAS”, maka jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan (Sugiyono, 2008:213).

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi (Sugiyono, 2011: 299). Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (understandable) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Hennink, Hutter & Bailey, 2020; Sarmanu, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif perlu diperhatikan, sebab kualitas riset sangat tergantung dari kualitas dan kelengkapan data yang telah didapatkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, dimana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif biasanya bertumpu pada triangulasi data yang diperoleh dari tiga metode yaitu *interview*, *participant observation*, dan analisis dokumen (*document record*) (Marshall, & Rossman, 1999).

3.3 Data dan Sumber Data

A. Data

Adapun data yang digunakan ialah semua data dan informasi yang didapatkan dalam bentuk dokumen dan lisan dengan metode wawancara langsung peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tema dalam judul skripsi ini. Data juga dapat berupa dokumentasi maupun kestrukturannya dalam suatu instansi.

B. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis maupun dokumentasi/foto.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video/audio recorder, maupun pengambilan foto. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, tenaga pendidik serta staf tata usaha SMKN 1 Tanjung Palas. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan Program Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas.

3.4 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah. Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya masalah itu sendiri (Moleong, 2000:62).

Sehingga untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana jalannya program Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah menengah. Dalam penelitian ini khususnya kinerja guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008:240). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa dokumen seperti Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, data sekolah dan data lain yang memiliki relevansi dengan suatu subjek dalam penelitian ini.

Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data-data yang tidak diterangkan dalam wawancara. Menurut Guba dan Lincoln dokumen ialah setiap bahan tertulis atau pun film. Studi dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data pendukung yang ditandai berupa segala catatan tertulis maupun gambar-gambar yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai program Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan kinerja guru di SMKN 1 Tanjung Palas.

2. Observasi (pengamatan)

Nasution (1988) dalam Sugiyono menyatakan, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2007:226). Pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk meningkatkan kinerja guru khususnya di SMKN 1 Tanjung Palas, sehingga dalam hal itu dapat disimpulkan mengenai upaya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kinerja guru.

Klinger (dalam Arikunto, 2006:222) mengatakan bahwa mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar.

3. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang mengajukan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186).

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman atau instrumen wawancara yaitu berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada subyek penelitian, sedangkan wawancara yang diterapkan adalah wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list (Arikunto, 2002:20).

Wawancara digunakan untuk mengetahui upaya sekolah menjalankan program Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara formal yaitu metode wawancara dimana peneliti menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Pedoman tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data-data tentang upaya yang dilakukan lembaga terkait.

Selain itu wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan yang diharapkan dari responden. Maka dari itu, dalam wawancara semi terstruktur ini diperlukan adanya pedoman wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan terkait. Namun, nantinya pertanyaan juga bisa dikembangkan

ketika berada di lapangan. Sehingga dengan demikian akan diperoleh data yang lengkap untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

4. Studi Pustaka

Pada dasarnya, studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan non-fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel.

Studi pustaka berfungsi untuk memasukkan sebuah studi baik itu dalam bentuk teori atau dalam bentuk penelitian ke dalam tubuh sebuah karya tulis serta memberikan konteks yang relevan bagi pembaca. Dengan mempelajari dan mengkaji literatur terhadap permasalahan yang diteliti melalui buku, artikel, karya ilmiah, media cetak, dan media elektronik (internet).

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik pengolahan data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengolahan data.

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pengolahan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2008:245).

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidkan data. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari sumber-sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya akan diminta kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data di lapangan penelitian ini menggunakan Model *interactive* yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dengan model ini dilakukan aktifitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *coclusion drawing / verivication* (Sugiyono, 2008:246).

Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Teknik analisis data dalam suatu penelitian dilakukan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, sehingga peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo.
2. Tahap penyajian data, adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Tahap penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak dibagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor, yang juga sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kalimantan Utara sebanyak 747.415 jiwa.

Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yang sebelumnya disahkan menjadi provinsi baru dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.

Sebagai Provinsi baru yang ke 34 di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara diresmikan pada tanggal 22 April 2013 seiring dengan dilantiknnya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Dr. H. Irianto Lambrie oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No.48/P Tahun 2013 tanggal 20 April 2013.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang penetapan keanggotaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang cakupan wilayahnya terdiri dari:

- Kabupaten Bulungan;
- Kota Tarakan;
- Kabupaten Malinau;
- Kabupaten Nunukan; dan
- Kabupaten Tana Tidung.

C. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara ialah:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

11. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
12. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
13. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
14. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
15. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

D. Kondisi Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara terletak pada posisi antara 114°35'22" – 118°03'00" Bujur Timur dan antara 1°21'36" – 4°24'55". Memiliki luas ± 75.467,70 km² dengan luas lautan seluas 11.579 Km² (13% dari luas wilayah total). Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.

- Sebelah Utara : Negara Sabah (Malaysia)
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Barat : Negara Sarawak (Malaysia)

4.2 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan serta tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis manajemen Pendidikan;
3. Perencanaan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kurikulum;
4. Perencanaan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perizinan kependidikan;
5. Perencanaan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis manajemen Pendidikan;
6. Perencanaan, Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana bahasa dan sastra;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesenian tradisional;
9. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sejarah dan cagar budaya;
10. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Permuseuman;
11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
12. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
13. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Fungsi Utama, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara memiliki program antara lain :

1. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Perumusan kebijakan pendidikan dan Kebudayaan

3. Manajemen pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB;
4. Manajemen Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya.
5. Manajemen perizinan pendidikan;
6. Manajemen teknis sarana bahasa dan sastra;
7. Manajemen teknis kesenian tradisional; sejarah dan cagar budaya;
8. Manajemen teknis urusan permuseuman;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan; dan
10. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Dalam rangka menyukseskan program Pendidikan di Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara merangkum tujuan Pendidikan dalam visi dan misinya.

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara adalah:

“Unggul dan Profesional Dalam Layanan Pendidikan dan Kebudayaan Demi Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Utara yang Kompetitif dan Bermartabat”

Misinya ialah sebagai berikut:

- Mewujudkan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan angka partisipasi murni dan nilai transisi dan menurunkan angka putus sekolah dan luar sekolah
- Mewujudkan kelangsungan program pemberian bantuan Pendidikan
- Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menaikkan nilai rata-rata hasil evaluasi akhir pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan melalui kegiatan kurikuler ekstrakurikuler
- Meningkatkan peran serta pendidikan dalam pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran
- Memfasilitasi perencanaan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Utara
- Mewujudkan internalisasi nilai budaya kepada pelajar melalui kegiatan pergelaran, festival, pameran, parade dan bentuk sajian seni budaya yang positif

Motto Dinas Pendidikan Kalimantan Utara:

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendidikan Menengah Atas;
- d. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK, dan PK-PLK;
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas teknis dari Kepala Dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pelaporan tugas Cabang Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara berikut penjelasannya.

1. Kepala Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Cabang Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
- b. Penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Pelaksanaan' kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol;
- e. Melaksanakan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

3. Seksi Pendidikan Menengah Atas

Seksi Pendidikan Menengah Atas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Menengah Atas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah atas;
- b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan menengah atas;
- c. Melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik SMA;
- d. Melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas;
- e. Melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas;
- f. Melaksanakan verifikasi peserta didik SMA;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.

4. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan Menengah

Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
- b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- c. Melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik SMK, didik khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- d. Melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- e. Melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah kejuruan;
- f. Melaksanakan verifikasi peserta didik SMK, didik khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.

B. Fungsi

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjabaran tersebut, fungsi pokok Dinas Pendidikan ialah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pembinaan pendidikan dasar;
3. Pembinaan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa;
4. Pembinaan pendidikan non formal dan informal;
5. Pembinaan pengembangan standar nasional pendidikan;
6. Pembinaan, Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan pendidikan; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

4.6 Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaan Indonesia, cita-cita Indonesia tetap seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Salah satu instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia adalah Dinas Pendidikan. Dinas pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah kerja. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Tentunya masing dinas punya misi dan wilayah kerja serta tugas masing-masing.

Secara umum dinas pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun daerah di dalam bidang pendidikan. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan sesuai wilayah kerja, agar berjalan lancar dan sesuai program dari pusat.

Sedangkan fungsi dari Dinas Pendidikan, yang pertama adalah sebagai perumus kebijakan teknik di bidang pendidikan. Jadi semua yang berhubungan dengan kebijakan teknik pendidikan, akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Fungsi kedua, adalah sebagai penyelenggara umum di bidang pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga berfungsi dalam mengatur penempatan guru yang bertugas, mulai dari pengangkatan Kepala Sekolah maupun untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Fungsi ketiga dari Dinas Pendidikan adalah sebagai pembina, pelaksana, dan pengembangan tugas di bidang pendidikan. Dinas pendidikan berhak mengajar siswa dan mengangkat jabatan fungsional seperti Pengawas Pendidikan.

Pengawas Pendidikan ini memiliki tugas untuk mengunjungi sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu, yaitu dengan melakukan evaluasi dari semua yang ada di dalam

sekolah, baik pendidik, sarana sekolah, serta semua yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.

Guru merupakan ujung tombak yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus dimulai dari guru.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan martabat guru. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah mewujudkan reformasi dalam dunia Pendidikan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tindakan tersebut antara lain melalui pembenahan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap guru yang meliputi pengembangan profesi guru, jaminan terhadap kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan penghargaan guru melalui satu Undang-Undang yang khusus mengatur tentang guru.

Dengan demikian ada landasan yang kuat untuk memberikan peluang bagi guru dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya secara efektif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) itu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru. Dalam salah satu Bab Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) menjelaskan tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat sehingga pada gilirannya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan akan meningkat pula.

Sehubungan dengan peningkatan profesionalisme guru, pemerintah terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sertifikasi merupakan angin segar bagi para guru, karena dengan adanya sertifikat pendidik, pemerintah menyediakan tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok, diharapkan dengan memberikan tunjangan tersebut dapat meningkatkan kinerja guru kearah yang lebih baik sehingga prestasi siswa meningkat juga. Dengan demikian jika kinerja guru dan profesionalisme guru meningkat, selanjutnya dapat dipastikan mutu pendidikan di Indonesia akan meningkat juga.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kinerja yang optimal guru haruslah berusaha mengembangkan serta menciptakan situasi yang ada dilingkungan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Guru benar-benar dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi karena dengan memiliki kinerja yang tinggi maka tingkat sumber daya manusia di Indonesia akan semakin baik apalagi di kalangan generasi muda sehingga terciptanya generasi yang cerdas, dan mampu menjawab tantangan yang datang kelak.

4.7 Program Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SMKN 1 Tanjung Palas menyatakan bahwa program Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara langsung mengikuti arahan dari pemerintahan pusat. Jadi dinas pendidikan daerah hanya meneruskan program yang disediakan oleh pusat. Program-program tersebut kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah termasuk ke SMKN 1 Tanjung Palas.

Untuk pengembangan guru, ada beberapa macam program yang sudah berhasil dilaksanakan oleh dinas pendidikan, diantaranya adalah:

A. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan dan menuntaskan sertifikasi guru dalam jabatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen.

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan PPG Dalam Jabatan (Daljab) ini adalah untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi Guru yang belum

memiliki sertifikat pendidik untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Salah satu metode yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru adalah dengan melakukan diklat secara daring. Diklat secara daring ini akan ditunjang dengan penggunaan LMS yang telah disediakan.

PPG bertujuan untuk mencetak guru-guru profesional yang nanti setelah menjalani pelatihan, para guru akan diberikan sertifikat yang dikenal dengan tunjangan sertifikasi.

B. Calon Guru Penggerak (CGP)

Program Calon Guru Penggerak (CGP) merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Program Guru Penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan, yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik; aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid; serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Untuk mendukung tercapainya tujuan itu, Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) dijalankan dengan menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership) yang mencakup komunitas praktik, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai perkembangan murid, dan kompetensi lain dalam pengembangan diri dan sekolah. Kompetensi tersebut dituangkan ke dalam tiga paket modul, yaitu paradigma dan visi Guru Penggerak; praktik pembelajaran yang berpihak pada murid; dan pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah.

Program CGP ini juga program yang berasal dari program pusat, bertujuan mencetak guru profesional untuk disiapkan menjadi pengawas dan kepala sekolah.

C. Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK)

Program PembaTIK merupakan program dari pusat. Program ini berfokus untuk menjadikan guru profesional dalam membuat bahan ajar seperti bahan ajar yang berbentuk *powerpoint*, animasi, dan seterusnya, agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik. Mengingat anak-anak masa kini tidak lagi begitu tertarik dengan tulisan-tulisan yang ditulis dipapan tulis kelasnya. Di era RI 4.0 (atau saat ini sudah sampai 5.0), mau tidak mau guru dituntut untuk berkreatifitas mengikuti perkembangan jaman dan teknologi.

PembaTIK adalah Program peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan dinas pendidikan dalam kegiatan Belajar, Mengajar, dan Berkarya untuk mendukung terciptanya Inovasi Pembelajaran Kolaboratif dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dengan mengedepankan Pemanfaatan Platform Teknologi.

Pelaksanaan PembaTIK 2024 oleh Kemendikbudristek melalui BLPT ini dilatarbelakangi oleh semakin majunya TIK dalam pendidikan. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Salah satu inisiatif yang mendukung hal ini adalah program PembaTIK (Pembelajaran Berbasis TIK).

Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi TIK bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pegawai dinas pendidikan, sehingga mampu berinovasi dalam pembelajaran kolaboratif sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka.

PembaTIK 2024 bertujuan untuk memberdayakan para guru dan tenaga pendidikan agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya. Dengan fokus pada pemanfaatan platform teknologi, program ini mendukung terciptanya inovasi pembelajaran yang kolaboratif dan kreatif, sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka. Salah satu manfaat mengikuti PembaTIK 2024 adalah meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi serta berbagi dan kolaborasi.

Untuk memastikan peningkatan kompetensi TIK yang terstruktur dan komprehensif, PembaTIK mengacu pada standar kompetensi yang terdiri dari empat level:

- a. Level Literasi: Penguasaan dasar TIK yang meliputi kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi dasar untuk mendukung proses pembelajaran.
- b. Level Implementasi: Kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran sehari-hari.
- c. Level Kreasi: Keterampilan dalam menciptakan konten digital yang mendukung pembelajaran inovatif.
- d. Level Berbagi & Berkolaborasi: Kompetensi dalam berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik serta sumber daya pendidikan secara digital dengan sesama pendidik.

4.8 Profil SMK Negeri 1 Tanjung Palas

Sekolah Menengah Kejuruan (disingkat SMK) adalah sekolah formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah setara dengan SMA/MA.

Sekolah Menengah Kejuruan adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lainnya yang sederajat. Tujuan pendidikan di SMK adalah membentuk setiap lulusan agar siap memasuki dunia kerja, dipekerjakan, atau sebagai wiraswasta. Untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan percepatan dan peningkatan kompetensi siswa.

Masa studi siswa jenjang SMK dilaksanakan selama tiga sampai empat tahun. SMK yang menerapkan masa studi pembelajaran selama empat tahun, yang terbagi menjadi tiga tahun masa studi di sekolah dan satu tahun di industri jurusan terkait.

Penyelenggara pendidikan terbagi menjadi dua yaitu negeri dan swasta. Ada beberapa jurusan yang biasanya diminati oleh calon siswa SMK, di antaranya adalah Jurusan Multimedia, Animasi, Administrasi, Akuntansi, Farmasi, Pariwisata, Pelayaran, Teknik Mesin, Tata Boga, Elektro dan sebagainya.

SMK Negeri 1 Tanjung Palas sebagai penyelenggara Pendidikan vokasi menciptakan lulusan yang memenuhi standar IDUKA dan memiliki jiwa kewirausahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut SMK Negeri 1 Tanjung Palas melakukan kemitraaan dengan IDUKA, pada ruang lingkup penyelarasan Kurikulum bersama IDUKA, magang Guru di IDUKA, magang siswa, pembelajaran berbasis proyek dan menghadirkan guru tamu dari IDUKA di sekolah. SMK Negeri 1 Tanjung Palas juga mengembangkan potensi

siswa tidak hanya pada prestasi akademik, juga prestasi non akademik di bidang seni dan olahraga. Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan bermakna bagi siswa, masyarakat dan mitra SMK Negeri 1 Tanjung Palas.

A. Sejarah Singkat

SMK Negeri 1 Tanjung Palas adalah sekolah yang berada di Jalan M.Tayib, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekolah ini didirikan sebagai unit sekolah baru pada tahun 2010 dan diresmikan oleh Bupati Bulungan H. Budiman Arifin pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011.

SMK Negeri 1 Tanjung Palas merupakan Sekolah Menengah Kejuruan pertama di Tanjung Palas. Masyarakat lebih mengenal dengan sebutan SMK Pertanian. Kehadirannya memberikan pilihan bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidang keahlian.

SMK Negeri 1 Tanjung Palas mulai menerima peserta didik baru pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, Guru, Staf Tata Usaha, dan peserta didik SMK Dharma Bakti Tanjung Selor bergabung dengan SMKN 1 Tanjung Palas. Mereka memiliki program keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Agribisnis Perikanan Sumber Daya Perairan. Sehingga, SMK Negeri 1 Tanjung Palas memiliki kelas X, XI, dan XII. Kepala sekolah yang menjabat di SMKN 1 Tanjung Palas saat itu adalah Bapak Zulkarnain Rizal, S.Pd. Beliau membuka program keahlian baru, yaitu Agribisnis Ternak Unggas. Maka, terdapat tiga program keahlian yang dimiliki SMKN 1 Tanjung Palas, yaitu Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Perikanan Sumber Daya Perairan, dan Agribisnis Ternak Unggas.

Pada tahun 2013 terjadi pergantian kepala sekolah, Bapak Zulkarnain Rizal, S.Pd. digantikan oleh Bapak Khoirul Anam, S.Pd., M. App. Ling. Beliau menjabat sebagai kepala SMKN 1 Tanjung Palas mulai tahun 2013 sampai dengan 2019. Setelah Bapak Khoirul Anam, S.Pd., M. App. Ling. resmi menjabat sebagai kepala sekolah, Beliau membuka dua kompetensi keahlian baru, yaitu Akomodasi Perhotelan dan Multimedia. Kedua kompetensi keahlian tersebut dibuka karena berkurangnya peminat pada kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Agribisnis Sumber Daya Perikanan.

Pada tanggal 7 Januari 2019 telah terjadi pergantian kepala sekolah. Bapak Khoirul Anam, S.Pd., M. App. Ling. digantikan oleh Ibu Fransiska Andayani, S.Pd. Berkat perjuangan dan usaha yang telah dilakukan, SMKN 1 Tanjung Palas telah berhasil menampung siswa sebanyak 169 siswa dan memiliki tenaga pengajar sebanyak 26 Guru, serta 10 Tenaga Kependidikan.

Pada tahun ajaran 2019/2020 SMK Negeri 1 Tanjung Palas membuka kompetensi keahlian baru, yaitu Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Hal ini dikarenakan, SMKN 1 Tanjung Palas akan menuju menjadi sekolah pencetak wirausaha. pada Tahun 2020/2021 SMK Negeri 1 Tanjung Palas membuka kompetensi keahlian baru yaitu Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian.

Pada Bulan Agustus 2023 terjadi pergantian Kepala Sekolah, Bapak Sulaiman Patandianan S.P., M.Pd menggantikan Ibu Fransiska Andayani, S.Pd. Hingga saat ini SMK Negeri 1 Tanjung Palas memiliki 3 Program Kompetensi Keahlian, yakni Agribisnis Tanaman, Agribisnis Perikanan, dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Seiring perkembangan Pembangunan pada segala Bidang di Provinsi Kalimantan Utara, maka SMKN 1 Tanjung Palas juga siap untuk memajukan dunia Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.

B. Visi dan Misi

Visi SMK Negeri 1 Tanjung Palas adalah **“Mewujudkan Lulusan Berkarakter Pelajar Pancasila, Kompeten dan Berdaya Saing”**

Misinya ialah sebagai berikut:

1. Membentuk karakter peserta didik agar bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pancasila melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
2. Menciptakan Lingkungan sekolah yang aman, sehat dan inklusif serta menyenangkan.
3. Mengembangkan kurikulum yang berpusat pada peserta didik, interaktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan dan dunia kerja
5. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berstandar dunia kerja.
6. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

7. Menanamkan jiwa wirausaha dan melatih keterampilan peserta didik dalam berwirausaha.
8. Melatih budaya kerja peserta didik agar dapat beradaptasi dengan budaya kerja dunia usaha dan dunia industri.
9. Menyiapkan peserta didik untuk menempuh pendidikan lanjutan di era global.

Gambar 4.2 Peta Jalan Pengembangan Sekolah



Sumber: <https://smkn1tanjungpalas.sch.id/>

4.9 Program Dinas Pendidikan Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri 1 Tanjung Palas

A. Tenaga Pendidik

Guru di SMKN 1 Tanjung Palas terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah guru yang mengajar mata pelajaran umum, misalnya seperti pelajaran Pendidikan Agama, Seni Budaya, dan muatan lokal. Kedua adalah guru yang mengajar mata pelajaran kejuruan, seperti pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kemudian ada guru yang mengajar pelajaran kejuruan atau kompetensi. Jadi walaupun guru yang mengajar di pelajaran umum, nantinya akan dikaitkan dengan pelajaran kejuruan. Contoh pelajaran matematika akan dikaitkan hitung-hitungan dalam dunia pertanian. Begitu pula dengan pelajaran bahasa Inggris akan dikaitkan dengan teks prosedur.

Dulu SMKN 1 Tanjung Palas kejuruannya beragam. Mulai dari pertanian, peternakan, hingga multimedia dan perhotelan. Guru-guru yang mengajar juga berasal dari berbagai kejuruan. Karena ada beberapa perubahan, guru dari SMKN 1 Tanjung Palas ada yang dipindahkan ke SMK di Tanjung Selor. Sekarang sekolah ini fokus pada 3 jurusan, yaitu Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura (ATPH), Agribisnis Perikanan Air Tawar (APAT), dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP).

Mengenai prestasi guru, pada peringatan hari besar seperti Hari Guru Nasional ada perlombaan membuat bahan ajar. Lomba ini biasanya diadakan ditingkat kabupaten dan provinsi. Ada beberapa guru yang menjadi perwakilan dari SMKN 1 Tanjung Palas yang turut mengikuti perlombaan tersebut. Kemudian, SMKN 1 Tanjung Palas pernah meraih juara 2 dalam perlombaan membuat video maupun lomba puisi pada tahun 2022, saat itu masa-masa akhir covid.

SMK Negeri 1 Tanjung Palas memiliki 26 orang tenaga pendidik dengan 10 orang staf tata usaha. Kestrukturannya ialah sebagai berikut:

Kepala Sekolah : *Sulaiman Patandianan, S.P., M.Pd*

Wakil Kepala Bidang Kurikulum : *Mia Indah Permatasari, S.Pd*

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan : *Rijasa, S.Sos*

Wakil Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana : *Samsul Hadi, S.P*

Wakil Kepala Bidang Humas : *Dwi Hartatik, H.M, S.Pd*

Kepala Kompetensi Agribisnis Tanaman : *Astria Zaitia, S.P*

Kepala Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan : *Muhram, S.Pi*

Kepala Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian : *Maya Romansyah, S.P*

Kepala Laboratorium : *Sul Asmi, S.Pd*

Kepala Perpustakaan : *V. Susilowati, S.Pd*

Kepala Bengkel Agribisnis Tanaman : *Yuyud Dedy Irawan, S.ST*

Kepala Agribisnis Perikanan : *Marthlinda K. Andik, S.Pi*

B. Pengaruh Program Dinas Pendidikan terhadap Kinerja Guru

Program dinas pendidikan yang sudah dikerjakan untuk meningkatkan kinerja guru di mulai dari guru-guru yang berstatus ASN yaitu ada program yang namanya SPK. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau di kelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di negaranya atau lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

Perubahan signifikan dari program dinas pendidikan saat ini adalah adanya pergantian kurikulum yang sebelumnya Kurikulum 2013 beralih menjadi Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum 2013 pembelajaran berfokus pada buku paket dan tugas-tugas tertulis, dengan kata lain kegiatan belajar mengajar dalam kurikulum ini berpusat pada arahan guru. Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak hanya di buku paket saja, tapi juga melibatkan perangkat elektronik dan media ajar. Guru bertindak sebagai fasilitator, yang aktif adalah peserta didiknya dengan melibatkan berbagai media belajar yang dibuat semenarik mungkin. Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi lebih aktif dikelas. Dengan kata lain, Kurikulum Merdeka berpusat pada keaktifan peserta didik.

Target sasaran program dinas pendidikan adalah untuk seluruh usia, baik itu untuk guru maupun para siswa. Tergantung apakah guru atau siswa tersebut mau mengambil kesempatan mengikuti program dari pusat atau tidak.

Melalui program ini, dinas pendidikan bersinergi dengan sekolah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Kemudian di SMK ada pemagangan guru yang dikenal dengan istilah *upskilling*. *Upskilling* berpotensi untuk meningkatkan kinerja guru dengan menjadikan guru karyawan magang di suatu perusahaan atau industri selama kurang lebih dua minggu. Sehingga setelah magang, guru dapat membawa ilmunya untuk mengajar disekolah. Siswa-siswi menjadi paham tentang industri perusahaan, dunia usaha dan dunia kerja. Alhasil tidak hanya guru, tapi siswa juga paham terkait dengan *upskilling*.

Kinerja guru yang meningkat di SMKN 1 Tanjung Palas adalah sekitar 80% guru telah tersertifikasi. Dari 26 orang jumlah guru, 20 orangnya telah memegang sertifikasi proses pelatihan menjadi guru profesional, sisanya masih ada 6 guru yang belum tersertifikasi atau sedang menyusul. Pada tahun ini, dari total jumlah guru SMKN 1 Tanjung Palas, satu orang guru sudah menjadi guru penggerak dan ada 7 orang guru sedang dalam proses menjadi guru penggerak. Dengan demikian, SMKN 1 Tanjung Palas aktif mengikuti program-program Dinas Pendidikan dan *update* dengan perkembangan program secara terus menerus.

Pelatihan-pelatihan dari program Dinas Pendidikan Provinsi sifatnya mengikuti arahan dinas pendidikan pusat termasuk hal-hal yang berkaitan dengan dana. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara hanya menjalankan program-program yang diturunkan dari pusat.

Untuk program yang berkenaan dengan keguruan kebanyakan bentuknya adalah pelatihan-pelatihan. Di SMKN 1 Tanjung Palas, ada yang namanya pelatihan asesor. Pelatihan asesor kompetensi adalah sebuah program untuk mempersiapkan peserta latihan supaya mempunyai kompetensi sebagai seorang asesor kompetensi yang sesuai standar ketetapan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Pelatihan asesor diperuntukkan bagi guru-guru yang produktif di sekolah atau guru-guru yang memegang mata pelajaran di kelas. Pelatihan asesor ini merupakan program baru di SMKN 1 Tanjung Palas. Dalam pelatihan asesor ada yang namanya uji kompetensi. Yang menguji harus memiliki sertifikat asesor atau jika tidak memiliki sertifikat maka dia harus memiliki masa mengajar minimal 5 tahun. Kalau sudah memiliki sertifikat asesor maka ia bisa langsung mengajar.

Dampak positif dari adanya program dinas pendidikan bagi guru adalah kualitas para guru sudah lebih baik dari sebelumnya. Salah satu program dari dinas pendidikan adalah adanya pelatihan-pelatihan untuk guru dimana-mana. Seperti adanya program PMM yang pelatihannya bisa dilakukan secara daring (online). Di program tersebut para guru harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya sertifikat untuk penilaian kinerja mereka. Guru dituntut secara mandiri mencari tempat-tempat pelatihan walaupun tidak ada program langsung dari diknas. Pusat menyediakan aplikasi PMM untuk mempermudah guru mencari pelatihan-pelatihan online demi menunjang performa mengajar dan pengadaan bahan ajar guru.

4.10 Faktor Penghambat Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru

A. Kendala Guru Menghadapi Program Merdeka Belajar

Dunia terus berkembang dan berjalan dalam ilmu, teknologi, informasi yang bergerak secara pesat. Peran pendidikan untuk mendatangkan perubahan dan perkembangan ke hal-hal yang lebih baik menjadi poros utama segala hal di dunia ini terjadi. Setiap masa ada orangnya, begitupun setiap masa beda kebutuhan pendidikannya. Pendidikan selalu identik dengan menjadikan manusia untuk mandiri dan melakukan perbaikan/perubahan. Maka tidak heran, guru sebagai peran sentral pendidikan selalu dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan zaman dan beradaptasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran.

Sebagaimana di Indonesia, setiap periode tertentu dunia pendidikan selalu dituntut beradaptasi akan perubahan sistem pendidikan. Secara umum perubahan kurikulum juga disesuaikan dengan adanya perubahan kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang di masyarakat. Kurikulum terus berganti disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi saat ini maupun di masa depan. Berbagai kebijakan yang terstruktur dan rumit harus dijalankan, agar dapat diterapkan di sekolah-sekolah, sehingga murid atau generasi muda bisa bersiap hidup mandiri di masa mendatang.

Program Merdeka Belajar menurut Mendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bukan hanya ditetapkan sebagai upaya solutif untuk menjawab tantangan di masa mendatang, namun

juga memberikan warna dan langkah baru dalam kegiatan belajar mengajar yang mendorong siswa lebih merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berkarya maupun dalam bertanya.

Program Merdeka Belajar menjadi suatu kebijakan yang dianggap transformatif di dunia pendidikan, tentu ada berbagai perubahan akan dirasakan oleh guru. Perubahan yang dirasakan guru ini menghadapkannya pada berbagai kendala yang perlu diatasi dengan baik. Berikut beberapa kendala guru dalam memasuki program merdeka belajar.

1. Tidak Memiliki Pengalaman dengan Kemerdekaan Belajar

Pengalaman personal para guru terkait kemerdekaan belajar masih minim. Menurut Shintia Revina, peneliti dari SMERU Research Institute, sebuah lembaga yang bergerak di bidang penelitian sosial-ekonomi di Indonesia, menyebutkan telah banyak program pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk mempromosikan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa program di antaranya seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) maupun Kelompok Kerja Guru (KKG).

Menurut Revina, alasan guru belum mampu mengadopsi kemerdekaan belajar dipicu oleh cara dan pengalaman guru belajar di bangku kuliah. Kurangnya rujukan penyelesaian soal dengan variasi metode di buku teks pun diduga sebagai penyebabnya. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan saat guru masih menjadi siswa, sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatan.

2. Keterbatasan Referensi

Buku teks yang ada saat ini dinilai masih berkualitas cukup rendah. Baik buku guru maupun siswa yang diterbitkan pusat perbukuan atau penerbit swasta belum memberikan referensi yang dapat membantu guru dalam memperoleh rujukan terkait bagaimana memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa dengan efektif. Keterbatasan dalam mendapatkan referensi pelaksanaan Merdeka Belajar inilah yang kemudian juga menjadi guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai.

3. Akses yang Dimiliki dalam Pembelajaran

Adanya perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata juga menjadi kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan merdeka belajar. Dalam wacana pelaksanaan merdeka belajar yang disampaikan Mendikbud, ada enam model pembelajaran yang dapat diterapkan. Salah satu model belajar yang dapat dilakukan ialah daring.

Kelancaran pelaksanaan belajar secara daring pastinya ditentukan dari akses digital dan internet yang dimiliki guru dan siswa. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai atau guru dan siswa yang aksesnya terbatas mengalami kesulitan. Perbedaan fasilitas, sarana prasarana dan kemudahan akses teknologi menjadi kendala yang terkadang dihadapi guru.

4. Manajemen Waktu

Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Beberapa sekolah menentukan agenda yang cukup padat untuk melibatkan guru agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan.

Belum tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang menyertai. Guru sebisa mungkin bergerak dan menemukan cara kreatif inovatif dalam pembelajaran. Tidak semua guru mampu mengatur waktunya dengan baik, terutama dengan kesibukan atau persoalan yang lain yang sekiranya dihadapi.

5. Kompetensi (*skill*) yang Memadai

Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru. Beberapa guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital seperti Ms. Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan, dan lainnya.

Padahal, untuk melaksanakan merdeka belajar guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dengan melibatkan berbagai media atau model pembelajaran yang mendorong siswa. Kompetensi yang masih minim ini juga menjadi kendala guru dapat menjalankan merdeka belajar dengan cepat.

B. Faktor Penghambat Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas

Program dinas pendidikan yang mengikuti arahan pusat mulai dijalankan pada tahun 2017, setelah peralihan SMA/SMK yang sebelumnya dibawah dinas pendidikan kabupaten beralih ke dinas pendidikan provinsi. Sejak saat itu program dari pusat yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional diteruskan ke daerah provinsi untuk dijalankan oleh sekolah-sekolah. Jadi dinas pendidikan daerah tinggal meneruskan saja.

Salah satu yang menjadi kendala pada saat ini adalah penguasaan teknologi komputer bagi guru-guru yang usianya diatas 45 tahun. Kendalanya karena mereka baru mengenal komputer atau laptop sehingga kesulitan untuk mengajar menggunakan media ajar, sedangkan teknologi saat ini perkembangannya cepat sekali. Kondisi ini menjadi PR bagi sekolah, terutama bagi guru-guru yang sudah senior atau yang sudah tua. Mereka ini notabenenya dapat digolongkan gaptek (gagap teknologi).

Untuk guru-guru yang terkategori gaptek, dinas pendidikan mengakomodir dengan mengadakan program PembaTIK. Pada program ini guru-guru diasah agar paham cara penggunaan teknologi dan kreatif dalam membuat media ajar dikelas. Sehingga tidak ada alasan bagi tenaga pendidik tidak bisa mengajar karena keterbasan media ajar. Semua kembali kepada individu masing-masing karena dinas pendidikan telah memfasilitasi tenaga pendidik untuk menggali dan mengembangkan keilmuannya.

Namun ada juga tipe guru yang tidak mau berubah dan merasa nyaman dengan kondisi seadanya. Alhasil pembelajaran dikelas menjadi tidak optimal, terkesan monoton, dan tidak menarik bagi siswa. Ini akan menghasilkan pembelajaran yang tidak maksimal diterima oleh peserta didik.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai “Program Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Smk Negeri 1 Tanjung Palas”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara umum dinas pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun daerah di dalam bidang pendidikan. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan sesuai wilayah kerja, agar berjalan lancar dan sesuai program dari pusat. Guru merupakan ujung tombak yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang professional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus dimulai dari guru.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SMKN 1 Tanjung Palas menyatakan bahwa program Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara langsung mengikuti arahan dari pemerintahan pusat. Jadi dinas pendidikan daerah hanya meneruskan program yang disediakan oleh pusat. Program-program tersebut kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah termasuk ke SMKN 1 Tanjung Palas. Untuk pengembangan guru, ada beberapa macam program yang sudah berhasil dilaksanakan oleh dinas pendidikan, diantaranya adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG), Calon Guru Penggerak (CGP), dan Pembelajaran Berbasis TIK (PembTaTIK).
3. Guru di SMKN 1 Tanjung Palas terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah guru yang mengajar mata pelajaran umum, misalnya seperti pelajaran Pendidikan Agama, Seni Budaya, dan muatan lokal. Kedua adalah guru yang mengajar mata pelajaran kejuruan.

SMK Negeri 1 Tanjung Palas memiliki 26 orang tenaga pendidik dengan 10 orang staf tata usaha.

4. Perubahan signifikan dari program dinas pendidikan saat ini adalah adanya pergantian kurikulum yang sebelumnya Kurikulum 2013 beralih menjadi Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum 2013 pembelajaran berfokus pada buku paket dan tugas-tugas tertulis, dengan kata lain kegiatan belajar mengajar dalam kurikulum ini berpusat pada arahan guru. Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak hanya di buku paket saja, tapi juga melibatkan perangkat elektronik dan media ajar. Target sasaran program dinas pendidikan adalah untuk seluruh usia, baik itu untuk guru maupun para siswa. Tergantung apakah guru atau siswa tersebut mau mengambil kesempatan mengikuti program dari pusat atau tidak. Kinerja guru yang meningkat di SMKN 1 Tanjung Palas adalah sekitar 80% guru telah tersertifikasi. Dari 26 orang jumlah guru, 20 orangnya telah memegang sertifikasi proses pelatihan menjadi guru profesional, sisanya masih ada 6 guru yang belum tersertifikasi atau sedang menyusul. Pelatihan-pelatihan dari program Dinas Pendidikan Provinsi sifatnya mengikuti arahan dinas pendidikan pusat termasuk hal-hal yang berkaitan dengan dana. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara hanya menjalankan program-program yang diturunkan dari pusat. Dampak positif dari adanya program dinas pendidikan bagi guru adalah kualitas para guru sudah lebih baik dari sebelumnya. Salah satu program dari dinas pendidikan adalah adanya pelatihan-pelatihan untuk guru dimana-mana. Seperti adanya program PMM yang pelatihannya bisa dilakukan secara daring (online).
5. Salah satu yang menjadi kendala pada saat ini adalah penguasaan teknologi komputer bagi guru-guru yang usianya diatas 45 tahun. Kendalanya karena mereka baru mengenal komputer atau laptop sehingga kesulitan untuk mengajar menggunakan media ajar, sedangkan teknologi saat ini perkembangannya cepat sekali. Untuk guru-guru yang terkategori gaptek, dinas pendidikan mengakomodir dengan mengadakan program PembaTIK. Pada program ini guru-guru diasah agar paham cara penggunaan teknologi dan kreatif dalam membuat media ajar dikelas. Sehingga tidak ada alasan bagi tenaga pendidik tidak bisa mengajar karena keterbasan media ajar. Semua kembali kepada individu masing-masing karena dinas pendidikan telah memfasilitasi tenaga pendidik untuk menggali dan mengembangkan keilmuannya.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kompetensi guru harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas. Pembinaan kompetensi guru yang meliputi program Pendidikan Profesi Guru (KKG), Calon Guru Penggerak (CGP), dan Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara harus konsisten dan berkelanjutan. Dinas Pendidikan secara langsung maupun tidak langsung/melalui forum KKG, CGP, serta PembaTIK yang sudah berjalan perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Perlunya peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) agar upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dapat terlihat out putnya, sehingga dapat memberi sumbangsih upaya apa yang harus ditingkatkan dan perlu diperbaiki. Selain hal tersebut harus ditingkatkan pula pemberian penghargaan terhadap guru, kepala dan pengawas sekolah sesuai prestasi tertentu agar menjadi pemicu motivasi kinerja guru.
3. Penulis berharap semakin banyaknya guru yang mengikuti program-program peningkatan kualitas guru. Karena dengan semakin banyaknya guru yang mengikuti program-program maka akan semakin baik juga kinerja atau kualitas guru.
4. Diharapkan Dinas Pendidikan terus meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada guru dan membuat program-program peningkatan kualitas guru lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DI*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Maisah. 2010. *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Munib, Achmad. 2008. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. UNNES.
- , 2003. *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th 2003*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muspawi, Mohammad. 2021. *Strategis Peningkatan Kinerja Guru*.
- , Undang-Undang Dasar 1945
- Anonim, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional
- , Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- , Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- , Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Jurnal

- Abd. Khalid Hs. *Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Negeri 1 Lore Utara*. Pandipa, Vol. 12, No. 1, Maret 2019
- Hary Susanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan*. Jurnal Pendidikan Lokasi, Vol. 2, No. 2, Juni 2012
- Asri Yani dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru*. Diakses pada 30 Mei 2024
- Arfah Dina dkk. *Teori Kinerja Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 3, No. 1

Devit Kurniawan dkk. *Capacity Building Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kinerja Guru (Studi Kasus Guru Ppkn Smp Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo)*. Diakses pada 29 Mei 2024

Fadhilah, Syahril. *Peran Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Serambi Tarbawi, Vol. 7, No. 1, Januari 2019

Putri Tania Saskia Desky dkk. *Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 7, No. 4, November 2022

Siswopranoto, Mokh. Fakhruddin. *Standar Mutu Pendidikan*. Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1, Maret 2022

Internet

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Diakses pada 9 September 2024 dari <https://kesbangpol.kaltaraprov.go.id/visi-misi/>

Profil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Diakses pada 9 September 2024 dari <https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-provinsi-kalimantan-utara/>

Kalimantan Utara. (2024). Diakses pada 15 September 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kalimantan Utara. (2023). Diakses pada 16 September dari <https://disdikbud.kaltaraprov.go.id/pages/2/visi-dan-misi.html>

Apa Itu PPG, Manfaat, dan Cara Daftar Program Sertifikasi Guru. (2022). Diakses pada 20 September 2024 dari <https://pijarsekolah.id/blog/manfaat-dan-cara-daftar-program-sertifikasi-guru/>

Program PembaTIK Jadikan Guru “Duta Teknologi”. Yuk Daftar!. (2018). Diakses pada 20 September 2024 dari <https://alazhar-yogyakarta.com/program-pembatik-jadikan-guru-duta-teknologi-yuk-daftar>

Inovasi Pembelajaran Digital sebagai Wujud Implementasi Kurikulum Merdeka. (2024). Diakses pada 25 September 2024 dari <https://pembatik.kemdikbud.go.id/>